



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**

**LAPORAN AKUNTABILITAS**

**TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda-Litbang) Kabupaten Enrekang tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh BAPPEDA-LITBANG selama tahun 2018. Dengan laporan ini, kinerja BAPPEDA-LITBANG dapat tergambar, sekalipun menjadi bahan Evaluasi dalam mengambil berbagai langkah strategis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya sebagai organisasi perangkat daerah untuk semakin memperkuat dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah terutama dalam mendukung pencapaian Visi “ Enrekang Maju Aman dan Sejahtera ” Tahun 2014-2018.

Diharapkan LAKIP BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Enrekang pada Tahun 2018 ini, dapat memberikan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan mengenai pencapaian kinerja BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Enrekang dalam tahun kelima pelaksanaan Renstra Tahun 2014 - 2018. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan sesuai target yang ditetapkan sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan di Kabupaten Enrekang.

Enrekang, Februari 2019  
Kepala Bappeda Kab. Enrekang

**Dr. H.Baba, SE, MM**

Pangkat. Pembina Utama Muda

Nip. 19681231 199403 1 105

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Sistematika Pelaporan	3
1.3. Kondisi Internal Organisasi	4
1.4. Lingkungan Eksternal	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Visi Bappeda	10
2.2. Misi Bappeda	12
2.3. Tujuan Dan sasaran	13
2.4. Strategi dan Kebijakan	15
2.5. Program dan Kegiatan	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2. Realisasi Anggaran	27
BAB IV. PENUTUP	30
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Perjanjian kinerja SKPD	
- Struktur Organisasi Bappeda-Litbang	
- Perjanjian kinerja Bappeda-litbang	

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebagai Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil. Dalam kaitan ini prinsip good governance telah menjadi nilai-nilai universal dan sejalan dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, kinerja Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai good governance yang secara nyata dapat dirasakan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda-Litbang, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang tahun 2018.

## **1.2. Sistematika Pelaporan**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selama Tahun 2018. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

**Bab I – Pendahuluan** Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (trategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab II – Perencanaan Kinerja** Menguraikan ringkasan / iktihisar perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018**, menyajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

### A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandigkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas evisiensi penggunaan sumber dana;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

**Bab IV – Penutup** Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- Perjanjian kinerja
- Struktur Organisasi
- Realisasi Kegiatan Pembangunan Bappeda-Litbang Tahun 2018

### 1.3. Kondisi Internal Organisasi

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan perencanaan pembangunan daerah maka berdasarkan Kepres Nomor 27 Tahun 1980 di bentuklah organisasi BAPPEDA,

sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa struktur kelembagaan telah mengalami perubahan, demikian juga tugas pokok dan fungsinya telah mengalami penyesuaian/perubahan. Pembentukan BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Enrekang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja.

Bappeda-Litbang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Bappeda-Litbang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan, Penelitian dan pengembangan daerah ;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Membina dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. Menyelenggarakan dan pembinaan monitoring & evaluasi perencanaan Pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam tugasnya dibantu oleh:

**1. Sekretaris, membawahi**

- Sub. Bagian Umum & Kepeg
- Sub. Bagian Perencanaan & Keuangan

**2. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

- Sub. Bidang Prasarana Wilayah
- Sub. Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
- Sub. Bidang Perumahan dan Tata Ruang

**3. Bidang Litbang Monev & Perencanaan Makro**



- Sub. Bidang Monev & Pelaporan
- Sub. Bidang Perencanaan Makro
- Sub. Bidang Litbang

#### 4. Bidang Ekonomi Sosbud & Pemerintahan

- Kasubid Ekonomi
- Kasubid Pemerintahan
- Kasubid Sosial Budaya

#### 5. Kelompok Jabatan Fungsional

##### 1.3.1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 03 Enrekang Telepon/Fax 0421-21222, memiliki Peralatan pendukung operasional kegiatan Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang Terdiri dari : 1 (satu) Ruang Kepala Badan, 1 (satu) Ruang Sekertaris, 1 (satu) Ruang Sekretariat, 1 (satu) Ruang Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 1 (satu) Ruang Bidang Ekonomi Sosial Budaya dan Pemerintahan, 1 (satu) Ruang Bendahara, 1 (satu) Ruang Bidang Litbang Monev & Perencanaan Makro, 1 (satu) Ruang Rapat. Peralatan kantor sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel  
Sarana & Prasarana Bappeda-Litbang

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang
	<b>Peralatan Mesin</b>	
1	Mobil	2
2	Sepeda Motor	19
3	Lemari	10
4	Filling Besi	2
5	Papan Pengumuman	3
6	Meja Kerja	57
7	Kursi	
8	AC	16
9	PC Unit	5

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang
10	Laptop	25
11	Printer	22
12	UPS	1
13	Brangkas	1
14	Mesin Ketik	1
15	Loudspeker	1
16	Meja tennis	1
17	Peralatan Jaringan	1
No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang
18	Mesin Pemetong Rumput	2
19	TV	3
20	Vacum	1
21	Mimbar	1
22	CCTV	16
23	Scanner	1
24	Microphone	3
25	Mixer PC	1
26	Fax	1
27	Handpone	2
28	Camera	3
29	GPS	2
30	Portable	1
31	Proyektor	4

Kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini dari segi kuantitas sudah memadai namun kualitasnya mengalami penurunan karena beberapa sarana yang ada sudah banyak yang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk digunakan karena sudah rusak berat.

### **1.3.1. Pembinaan Staf**

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 maka pembinaan staf di Bappeda-Litbang berdasarkan sistem karier dan system prestasi kerja. Penilaian dilaksanakan atas hasil pelaksanaan tupoksi masing-masing staf serta tugas lainnya yang diberikan pimpinan yang dilihat dari hasil pelaksanaan pekerjaan, ketetapan waktu, dan ketetapan sasaran serta pembinaan staf dilakukan secara berjenjang. Dalam pelaksanaan pembinaan kadang menerapkan system induksi, system parsitipatif dan system lainnya yang disesuaikan dengan karakter

masing-masing staf. Daftar hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS pada kantor Bappeda-Litbang periode tahun 2018 sebagai berikut :

▪ Amat Baik	( 91-100 )	= - Orang
▪ Baik	( 76-90 )	= 28 Orang
▪ Cukup	( 61-75 )	= - Orang
▪ Sedang	( 51-60 )	= - Orang
▪ Kurang	( ≤ 50 )	= - Orang

Pembinaan yang dilakukan termasuk penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain kedisiplinan dalam melaksanakan apel pagi dan apel siang dan kehadiran. Kepada Staf yang tidak hadir atau tidak mengikuti apel dilakukan teguran secara lisan. Jika telah ditegur secara lisan tiga kali berturut-turut maka diberikan teguran secara tertulis.

Disamping pembinaan disiplin PNS, juga dilakukan pelayanan akan hak-hak PNS pada tahun 2018 seperti pemberian gaji berkala kepada 11 orang PNS, kenaikan pangkat kepada 6 orang. Memberikan kesempatan kepada staf untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :

➤ Program Doktor (S3)	= - Orang
➤ Program Magister (S2)	= - Orang
➤ Program Strata Satu	= 2 Orang
➤ Program Diploma IV	= - Orang
➤ Latpim III	= - Orang
➤ Latpim IV	= 1 Orang
➤ Diklat Teknis	= 28 Orang

#### **1.4 Lingkungan Eksternal Organisasi**

Lingkungan eksternal organisasi merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi organisasi dalam melaksanakan tupoksinya. Jika peluang dapat dimanfaatkan

sebaik-baiknya dan tantangan dapat diatasi dengan baik maka pelaksanaan tupoksi akan mencapai hasil yang optimal dan sebaliknya. Lingkungan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan tugas Bappeda-Litbang adalah :

- Kebijakan Pemerintah Tingkat atas ( Propinsi dan Pusat )
- Kebijakan–kebijakan Pemerintah Kabupaten Enrekang
- Peraturan Daerah
- Stakeholders baik perorangan, Organisasi Masyarakat dan OPD
- Kebijakan-kebijakan luar negeri termasuk era globalisasi

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Visi Bappeda-Litbang

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Enrekang, sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberi mandat oleh Undang-undang sebagai penyelenggara kewenangan otonomi daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, selalu dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Enrekang sangat ditentukan oleh kinerja BAPPEDA-LITBANG. Karena perencanaan merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang. Eksistensi BAPPEDA-LITBANG yang efektif dan efisien di masa depan, akan banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam manajemen perencanaan. Ini berarti bahwa perencanaan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan daerah, memerlukan manajemen yang mampu menjamin terciptanya dokumen-dokumen dan produk perencanaan yang valid dan dapat dipercaya.

Salah satu langkah dalam manajemen pada umumnya, dan juga manajemen perencanaan adalah perumusan visi organisasi, agar setiap anggota di dalamnya memahami arah dan tujuan-tujuan yang ada dicapai bersama. Pernyataan visi BAPPEDA-LITBANG akan dapat membantu setiap pejabat dan apratur untuk dapat menilai kinerja masa lalu, dan mengidentifikasi berbagai langkah penting untuk dilakukan di masa depan. Visi diharapkan akan membangkitkan motivasi kerja secara kolektif, karena setiap orang dalam organisasi akan memahami tujuan-tujuan untuk lima tahun yang akan datang. Pernyataan visi BAPPEDA-LITBANG diharapkan mampu

menciptakan konsensus dari setiap stakeholders sehingga mereka memiliki komitmen yang tinggi dan mencurahkan segala daya dan kemampuan demi tercapainya cita-cita organisasi khususnya, dan pembangunan masyarakat Kabupaten Enrekang pada umumnya disamping itu, pernyataan visi dapat diciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh pejabat dan pegawai tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama.

Selain pandangan umum diatas, visi Bappeda-Litbang juga dirumuskan dengan memperhatikan visi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 yaitu **“Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS), Menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan”**

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini dirumuskan visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Enrekang untuk lima tahun kedepan sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERPADU, PARTISIPATIF DAN BERKUALITAS MENUJU ENREKANG MAJU AMAN SEJAHTERA”**

Makna tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa kondisi yang dituju adalah terwujudnya institusi perencanaan yang strategis sebagaimana kedudukan, peran dan fungsi Bappeda sebagai institusi yang melaksanakan proses perencanaan dan menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan Daerah. Dokumen-dokumen Daerah yang disiapkan oleh Bappeda-Litbang sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah merupakan dokumen-dokumen yang strategis bagi Pemerintah Daerah. Terhadap dokumen-dokumen ini dituntut kualitas dan akuntabilitasnya, baik dari segi

substansi maupun prosedur/prosesnya, dengan demikian tuntutan terhadap pemenuhan visi tersebut akan meliputi tuntutan terhadap kualitas lembaga, akuntabilitas produk, dan akuntabilitas prosedur/proses perencanaan.

2. *Terpadu* ; perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tidak secara parsial tetapi saling terintegrasi antara bidang dan sektor. Hal ini diikuti dengan tidak berkembangnya ego sektoral dari masing – masing bidang/SKPD;
3. *Partisipatif* ; bahwa proses perencanaan pembangunan lebih menekankan pada peran Stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
4. *Berkualitas* ; Bahwa dokumen perencanaan pembangunan saling memiliki keterkaitan dan konsistensi baik ditingkat daerah, propinsi maupun pusat. Secara substansi muatan dokumen perencanaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah disertai dengan kejelasan indikator dan target kinerja serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada;

## **2.2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Enrekang 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Teknologi Informasi

2. Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan antar Sektor yang berbasis Kawasan
3. Membangun Penguatan Fungsi Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Memperkuat Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah berbasis Teknologi Informasi
5. Mengoptimalkan Sistem Koordinasi dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah

### **2.3. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama lima tahun.

#### **2.3.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Enrekang.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 adalah :lihat renstra



1. Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, selaras dengan perencanaan propinsi dan nasional, serta didukung koordinasi perencanaan dan penyusunan program dengan perangkat daerah;
2. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah serta pelaporan pelaksanaan yang transparan akuntabel;
3. Meningkatkan implementasi sistem dan proses perencanaan pembangunan daerah yang konsisten
4. Mewujudkan program perencanaan yang terukur, sistimatis dan berbasis kinerja.

### **2.3.2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 adalah:

1. Terbitnya produk dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dipersyaratkan pada setiap daerah, Indikator : i). Persentase dokumen perencanaan yang terbit tepat waktu sesuai aturan yang berlaku (100%); ii) Persentase pelaksanaan terhadap proses dan mekanisme perencanaan berjalan sesuai aturan (100%).
2. Terciptanya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan Provinsi dan Nasional. Indikator :i) Tingkat sinkronisasi perencanaan melalui proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah (100%).

3. Optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Indikator : i) Tingkat rata-rata capaian realisasi program kegiatan tahunan daerah (90%); ii) persentase OPD yang membuat laporan evaluasi pelaksanaan program kegiatan OPD (100%).
4. Terwujudnya basis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Indikator : i) Persentase usulan pemerintahan yang memiliki database dan informasi bahan perencanaan pembangunan daerah (85%).

#### 2.4. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Enrekang dihasilkan dari analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Tabel. IV.II

<u>Strengths (Kekuatan)</u> 1. Adanya peraturan daerah tentang perencanaan partisipatif. 2. Kompetensi SDM Aparatur memadai 3. Ketersedian sarana dan prasarana kantor cukup memadai	<u>Opportunity (Peluang)</u> 1. UU No. 25 Tahun 2004, PP.8/2008 dan Permendagri No. 54/2010. 2. Adanya RPJMD Povinsi, RPJMD Kabupaten. 3. Komitmen pemerintah dalam konsistensi perencanaan.
<u>Weakness(Kelemahan)</u> 1. Kurangnya motivasi kerja aparatur	Tantangan 1. Intervensi Politik dalam

2. Lemahnya data dan informasi perencanaan 3. Terbatasnya jumlah personil	perencanaan. 2. Kecenderungan penurunan motivasi stakeholder dalam mengikuti musrenbang 3. Perencanaan sudah menjadi rana peemriksaan. 4. Masih adanya ego sektoral.
--	---

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

### **Strategi**

Strategi pencapaian kinerja pelaksanaan dokumen perencanaan ini digunakan untuk mencapai sasaran persentase target sasaran yang ada didokumen RPJMD, pencapaian indikator impact merupakan tolak ukur dari keberhasilan dokumen perencanaan RPJMD.

Untuk memudahkan dalam merumuskan program dan kegiatan berdasarkan strategi pencapaian kinerja pelaksanaan dokumen perencanaan, maka disusun kebijakan.

Kebijakan Bappeda-Litbang adalah sebagai berikut:

- Menyusun SOP Perencanaan;
- Menyusun SOP Monitoring dan Evaluasi;
- Mereviu/revisi Perda Partispatif;

- Menyusun petunjuk teknis proses perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- Membangun kepastian alokasi atas usulan masyarakat;
- Membangun komunikasi dan koordinasi program ketingkat provinsi dan Nasional;
- Memaksimalkan diklat pengembangan SDM aparatur perencana;
- Mengintegrasikan proses politik kedalam mekanisme musrenbang;

## **Kebijakan**

Strategi Penetapan kebijakan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang disusun dengan tetap memperhatikan Program Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Enrekang tahun 2014-2018 yang relevan dengan kelembagaan BAPPEDA-LITBANG. Dalam kaitannya dengan Renstra Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang, maka kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Membentuk kader penggerak pembangunan di setiap desa;
- Optimalisasi koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- Pengalokasian anggaran partisipatif minimal 10% dari belanja langsung
- Mengkoordinasikan perencanaan pengembangan kawasan strategis.

## **2.5 . Program dan Kegiatan Tahun 2018**

### **A. Program**

Sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Enrekang yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018 dan Renstra BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Enrekang maka program untuk tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan
6. Program Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran SKPD
7. Program pengembangan data/informasi
8. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
11. Program Koordinasi Perencanaan Sosial Budaya
12. Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam
13. Program percepatan pembangunan sanitasi permukiman
14. Program pengembangan sistem pelaporan monitoring/pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

## **B. Kegiatan**

Pencapaian kinerja organisasi akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai. Untuk itu tentunya diperlukan suatu kegiatan yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Kegiatan organisasi merupakan penjabaran kebijakan dan program kerja sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran serta memberikan sumbangan bagi pencapaian misi organisasi. Kegiatan yang terdapat dalam Renstra BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Enrekang ini merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh BAPPEDA-LITBANG dalam merealisasikan program kerja operasionalnya. Untuk itu maka sejumlah kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik
- 1.2. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
- 1.4. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 1.5. Pelaksanaan pelelangan/Pengadaan barang dan jasa
- 1.6. Koordinasi, konsultasi dalam daerah & peninjauan lapangan
- 1.7. Pengelolaan administrasi keuangan & perkantoran
- 1.8. Penyediaan peralatan kebersihan dan perlengkapan dapur kantor
- 1.9. Penataan Halaman Kantor dan Penataan Lapangan Upacara

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- 2.1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
- 2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung / kantor
- 2.3. Pengadaan Peralatan gedung kantor
- 2.4. Pengadaan Mebeleur
- 2.5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor
- 2.6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 2.7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

## **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- 3.1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

## **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- 4.1. Diklat Teknis Tugas & Fungsi bagi PNS

## **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- 5.1. Penyusunan laporan catatan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 5.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulan, triwulan, semesteran dan akhir tahun

## **6. Program Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran OPD**

- 6.1. Penyusunan RKA – OPD
- 6.2. Penyusunan DPA – OPD
- 6.3. Penyusunan Rencana kerja – OPD

## **7. Program Pengembangan Data/Informasi**

- 7.1. Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Praswil dan SDA
- 7.2. Penyusunan/pengisian 8 kelompok data SIPD & rofil daerah
- 7.3. Penyusunan Daftar Alokasi Kegiatan/proyek APBD II, APBD I, dan APBN
- 7.4. Kajian dan Penelitian
- 7.5. Koordinasi Pengendalian Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 7.6. Updating dan E-Planning dan E-Monev
- 7.7. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan
- 7.8. Koordinasi dan Fasilitasi Pra Penyusunan RPJMD Tahun 2019-2023
- 7.9. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Kelitbangan

## **8. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh**

- 8.1. Koordinasi Penataan Ruang Daerah
- 8.2. Koordinasi Rencana-Rencana Pengembangan Kawasan

## **9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- 9.1. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 9.2. Penyelenggaran Musrenbang RKPD
- 9.3. Evaluasi RPJMD Periode 2014 - 2018
- 9.4. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018
- 9.5. Penyusunan KUA PPAS
- 9.6. Forum Perencanaan SKPD
- 9.7. Koordinasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs
- 9.8. Verifikasi/Asistensi Rancangan Kerja SKPD
- 9.9. Pengendalian dan Evaluasi RKPD

## **10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

- 10.1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
- 10.2. Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok

## **11. Program Koordinasi Perencanaan Bidang Sosbud**

- 11.1. Sinkronisasi dan Evaluasi Program Bidang Sosial Budaya
- 11.2. Koordinasi Penyusunan RPJM Desa
- 11.3. Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat
- 11.4. Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
- 11.5. Koordinasi Kabupaten Layak Anak
- 11.6. Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 11.7. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten
- 11.8. Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi antara RKPD dan RKPDes

## **12. Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam**

- 12.1. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengendalian Irigasi Partisipatif
- 12.2. Koord. Sinkronisasi dan evaluasi perencanaan bidang praswil SDA dan LH
- 12.3. Koordinasi Perencanaan dan Pengolahan Sistem Penyedia Air Minum/Air Bersih
- 12.4. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

## **13. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman**

- 13.1. Koordinasi Rencana Pembangunan Sanitasi Permukiman
- 13.2. Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)

## **14. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Monitoring/Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**

### 14.1. Monitoring dan evaluasi program/kegiatan



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Enrekang merupakan instansi pemerintah bagian dari organisasi Pemerintah Kabupaten Enrekang yang memiliki tugas pokok di bidang Perencanaan Daerah, dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Enrekang diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku.

LAKIP BAPPEDA-LITBANG tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Bappeda-Litbang yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/tahun tertentu.

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Berdasarkan Rencana Kinerja jangka menengah dan tahunan Bappeda-Litbang yang telah disusun maka terdapat 4 sasaran strategis yang ingin dicapai. Evaluasi kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terbitnya produk dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dipersyaratkan pada setiap daerah, Indikator : i). Persentase dokumen perencanaan yang terbit tepat waktu sesuai aturan yang berlaku (100%); ii)

Persentase pelaksanaan terhadap proses dan mekanisme perencanaan berjalan sesuai aturan (100%).

2. Terciptanya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan Provinsi dan Nasional. Indikator :i) Tingkat sinkronisasi perencanaan melalui proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah (100%).
3. Optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Indikator : i) Tingkat rata-rata apaian realisasi program kegiatan tahunan daerah (90%); ii) persentase OPD yang membuat laporan evaluasi pelaksanaan program kegiatan OPD (100%).
4. Terwujudnya basis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Indikator : i) Persentase usulan pemerintahan yang memiliki database dan informasi bahan perencanaan pembangunan daerah (85%).

### 3.2. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
**Pengukuran Capaian Kinerja  
Tahun 2018**

NO.	Sasaran	Indikator			
		Uraian	Target	Realisasi	%
1	Terbitnya produk dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dipersyaratkan pada setiap daerah	1. Persentase dokumen perencanaan yang terbit tepat waktu sesuai aturan yang berlaku	100%	100%	100
		2. Persentase pelaksanaan terhadap proses dan mekanisme perencanaan berjalan sesuai aturan	100%	100%	100
2	Terciptanya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan Provinsi dan Nasional	Tingkat Sinkronisasi Perencanaan melalui Proses dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100

NO.	Sasaran	Indikator			
		Uraian	Target	Realisasi	%
3	Optimalnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Tingkat rata-rata capaian realisasi program kegiatan tahunan daerah	90%	93,34%	100
		2. Persentase OPD yang membuat laporan evaluasi pelaksanaan program kegiatan OPD	100%	100%	100
4	Terwujudnya Basis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Pemerintahan yang Memiliki Database dan Informasi Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah	85%	85%	100

Dari tabel tersebut diatas nampak bahwa tingkat pencapaian indikator kinerja dan Adanya aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan OPD. Pencapaian indikator kinerja pada tabel diatas tingkat pencapaiannya 100%.

### 3.2.1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Capaian kinerja tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Enrekang dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017.

- 🚩 Pengukuran ketercapaian sasaran 1 Tebitnya produk dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dipersyaratkan pada setiap daerah menggunakan 2 indikator sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2  
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan realisasi capaian kinerja tahun 2017

Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja Thn 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian kinerja Thn 2018 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase dokumen perencanaan yang terbit tepat waktu sesuai aturan yang berlaku	%	80	80	100	100	100	100
Persentase pelaksanaan terhadap proses dan mekanisme perencanaan berjalan sesuai aturan	Paket				100	100	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas,

diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100% atau target yang diharapkan tercapai. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2017 dengan capaian kinerja tahun 2018 indikator sasaran tindakan mengalami peningkatan.

- ✚ Pengukuran ketercapaian sasaran 2, Terciptanya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan Provinsi dan Nasional, menggunakan 1 indikator sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3  
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2017 dengan realisasi capaian kinerja tahun 2018

Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja Thn 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian kinerja Thn 2018 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Tingkat Sinkronisasi Perencanaan melalui proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah	%	95	95	100	100	100	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna memuaskan. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2017 dengan capaian kinerja tahun 2018 indikator sasaran mengalami pelampauan target.

- ✚ Pengukuran ketercapaian sasaran 3, Optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, menggunakan 2 indikator sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4  
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2017 dengan realisasi capaian kinerja tahun 2018

Sasaran	Satuan	Tahun 2017	Capaian kinerja Thn	Tahun 2018	Capaian kinerja Thn
---------	--------	------------	---------------------	------------	---------------------

		Target	Realisasi	2017 (%)	Target	Realisasi	2018 (%)
Tingkat Rata-rata capaian realisasi program kegiatan tahunan daerah	%	100	91,13	100	100	93,34	100
Persentase OPD yang membuat laporan evaluasi pelaksanaan program kegiatan OPD	%	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna memuaskan. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2017 dengan capaian kinerja tahun 2018 indikator sasaran mengalami peningkatan.

- ✚ Pengukuran ketercapaian sasaran 4, Terwujudnya basis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, menggunakan 1 indikator sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5  
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2017 dengan realisasi capaian kinerja tahun 2018

Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja Thn 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian kinerja Thn 2018 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase Usulan pemerintah yang memiliki database dan informasi bahan perencanaan pembangunan daerah	%	80	85	100	85	85	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100 % atau bermakna memuaskan. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2017 dengan capaian kinerja tahun 2018 indikator sasaran mengalami peningkatan target.

### **3.2.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau**

**peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusinya yang telah dilakukan.**

Beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :

- a. Pencairan dana kegiatan yang sering terlambat atau tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- b. Masih ada PPTK/PPK yang terlambat dalam melakukan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan (Pemasukan SPJ tidak tepat waktu)
- c. Kemampuan sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan.
- d. Disiplin kerja PNS masih perlu di tingkatkan

Dan adapun solusi dalam meminimalisir kekurangan – kekurangan yang terjadi dalam pencapaian kinerja adalah :

- a. Melakukan perbaikan – perbaikan dalam rangka pencairan dana yang tepat waktu.
- b. Mensupport Para PPTK/PPK untuk melakukan pertanggung jawaban sesuai ketentuan (tepat waktu)
- c. Memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Bappeda-Litbang untuk memotivasi kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan peningkatan disiplin jam kerja.
- d. Memberikan kesempatan kepada pegawai Bappeda-Litbang untuk melakukan pengembangan SDM baik pendidikan formal maupun non formal

### **3.3. Realisasi Anggaran**

Pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja program kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas Keuangan Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang tahun 2018 secara umum diuraikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.079.657.235	1.054.508.503	97,67
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	427.300.900	410.685.820	96,11
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.000.000	25.000.000	100,00
4.	Program Peningkatan Kapasitas SDA	122.090.850	122.090.850	100,00
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.000.000	3.875.900	55,37
6.	Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran OPD	12.500.000	15.325.742	98,50
7.	Program Pengembangan Data/Informasi	947.310.310	935.788.716	98,78
8.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	98.853.700	90.318.400	91,37
9.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.014.311.824	972.066.324	95,84
10.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	160.450.000	146.915.175	91,56
11.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	687.513.150	497.969.128	72,43
12.	Program Perencanaan Praswil dan SDA	801.886.100	734.417.289	91,59
13.	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	174.050.000	168.250.800	96,67
14.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Monitoring/Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan	214.207.000	213.718.012	99,77
	<b>Total</b>	<b>5.772.131.069</b>	<b>5.387.916.917</b>	<b>93,34</b>

Indikator kinerja yang dihitung atau diukur mencakup semua biaya yang digunakan dalam setiap program atau kegiatan. Berdasarkan Surat Keputusan

LAN RI Nomor 239 Tanggal 25 Maret 2005 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan LAKIP, dapat dikatakan bahwa rata-rata pencapaian kinerja yang tergambar pada program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat diselesaikan dengan baik dengan prosentase realisasi keuangan sebesar 93,34%.



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1. Pengukuran Kinerja**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda-Litbang Kab. Enrekang Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Bappeda-Litbang Kab. Enrekang Tahun 2016. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Bappeda-Litbang Kab. Enrekang tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Bappeda-Litbang Kab. Enrekang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.772.131.069,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. Rp. 5.387.916.416,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,34 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Bappeda-Litbang Kab. Enrekang kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 384.214.653,-

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang, diharapkan dapat memberikan gambaran

Kinerja Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Enrekang.

#### **4.2. Upaya Pemecahan Masalah**

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

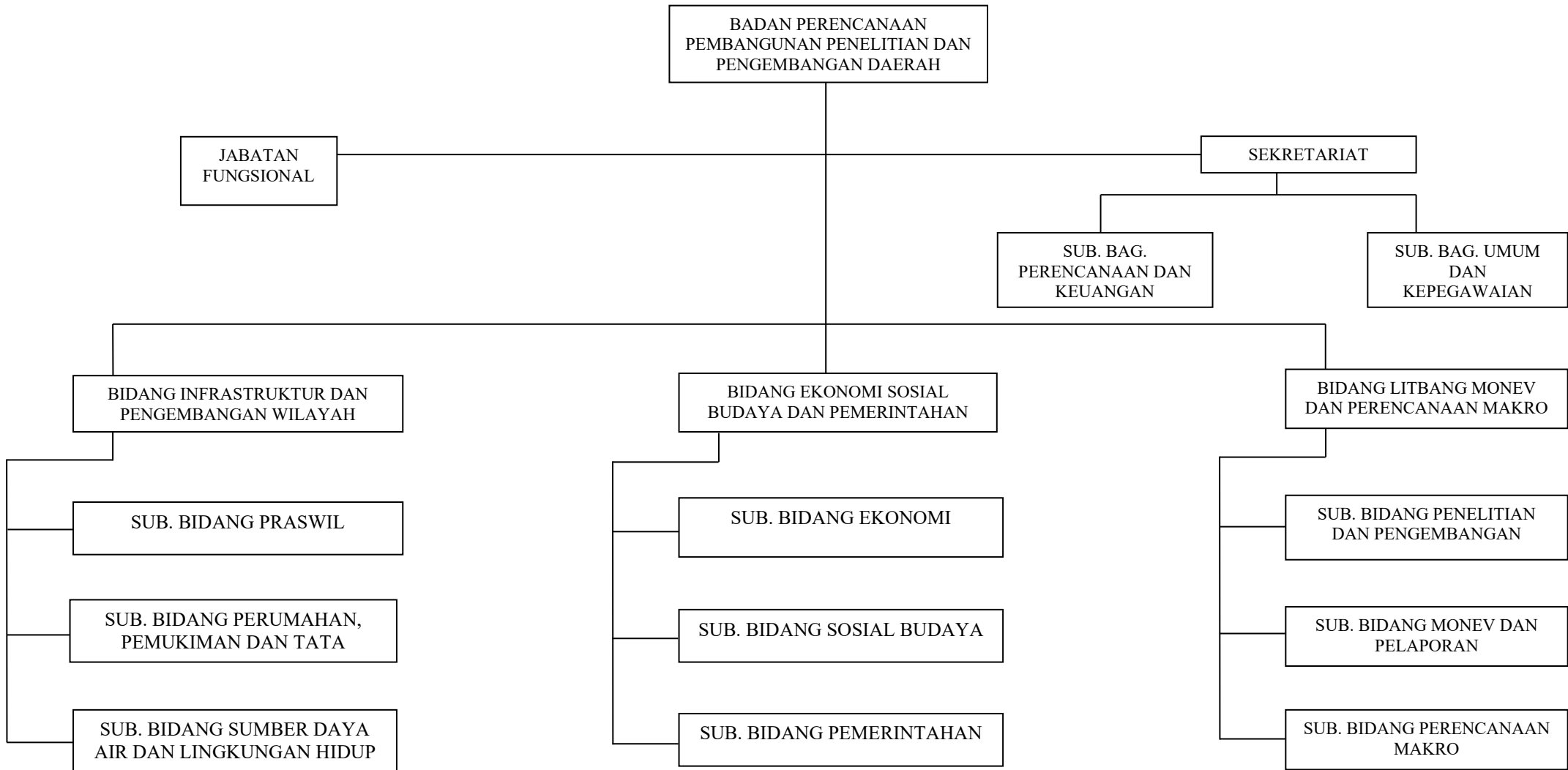
1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Enrekang sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
  - a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana;
  - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
  - c. Mengupayakan penerapan "reward dan punishment" secara proporsional;
  - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan dan penelitian
  - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran

menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.

3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.

**lampiran I**

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**



**LAMPIRAN II**

**REALISASI KEGIATAN PENBANGUNAN BAPPEDA – LITBANG TAHUN 2018**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran (Output)		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi (%)		Ket
			Tolak Ukur	Target			Fisik	Keuangan	
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>1,079,657,235</b>	<b>1,054,508,503</b>			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda-Litbang	Persentase ketersediaan prasarana yang memadai	100%	108,176,023	95,814,788	100.00	88.57	
2	Penataan dan Pemeliharaan Halaman/Lingkungan Perkantoran	Bappeda-Litbang	Tertatanya halaman kantor yang rapi dan bersih	4 Bidang Halaman	28,000,000	26,472,000	100.00	94.54	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bappeda-Litbang	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	7,500,000	7,500,000	100.00	100.00	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bappeda-Litbang	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	11,000,000	10,970,000	100.00	99.73	
5	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Enrekang, Provinsi dan Pusat	Frekuensi koordinasi dan konsultasi keluar daerah	48 Kali	400,000,000	399,340,115	100.00	99.84	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran (Output)		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi (%)		Ket
			Tolak Ukur	Target			Fisik	Keuangan	
6	Pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa	Bappeda-Litbang	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilelang	4 Paket	2,000,000	2,000,000	100.00	100.00	
7	Koordinasi, Konsultasi dalam Daerah & Peninjauan Lapangan	Kab. Enrekang	Frekuensi koordinasi dan peninjauan lapangan dalam daerah	96 Kali	104,536,412	104,520,000	100.00	99.98	
8	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perkantoran	Bappeda-Litbang	Jumlah jenis adm. Keuangan dan perkantoran yang dikelola	10 Jenis	393,044,800	382,622,600	100.00	97.35	
9	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Dapur Kantor	Bappeda-Litbang	Jumlah jenis peralatan kebersihan dan perlengkapan dapur kantor	9 Jenis	25,400,000	25,269,000	100.00	99.48	
	<b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>				<b>427,300,900</b>	<b>410,685,820</b>		96.11	
10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Bappeda-Litbang	Jumlah kendaraan dinas diadakan	3 Unit Sepeda Motor	100,375,000	98,181,000	100.00	97.81	
11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Bappeda-Litbang	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantoryang diadakan	9 Jenis	62,000,000	61,064,000	100.00	98.49	
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bappeda-Litbang	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	7 Jenis	95,500,000	93,095,000	100.00	97.48	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran (Output)		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi (%)		Ket
			Tolak Ukur	Target			Fisik	Keuangan	
13	Pengadaan Mebeleur	Bappeda-Litbang	Jumlah jenis mobiler kantor yang diadakan	5 Jenis	107,000,000	104,984,000	100.00	98.12	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Bappeda-Litbang	Jumlah jenis pekerjaan pemeliharaan kantor	12 Bulan	4,425,900	3,842,000	100.00	86.81	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bappeda-Litbang	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	11 Sepeda Motor, 2 Mobil	43,000,000	34,524,820	100.00	80.29	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bappeda-Litbang	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	15,000,000	14,995,000	100.00	99.97	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>		100.00	
17	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Bappeda-Litbang	Jumlah Pakaian Olahraga yang diadakan	42 Pasang	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumbur Daya Aparatur</b>				<b>122,090,850</b>	<b>122,090,850</b>		100.00	
18	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS	Bappeda-Litbang	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat/Bimtek	16 Orang	122,090,850	122,090,850	100.00	100.00	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan</b>				<b>7,000,000</b>	<b>3,875,900</b>		55.37	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran (Output)		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi (%)		Ket
			Tolak Ukur	Target			Fisik	Keuangan	
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Bappeda-Litbang	Adanya Dokumen LAKIP Bappeda-Litbang	1 Dok	3,500,000	2,925,900	100.00	83.60	
20	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulan, Triwulan, Semesteran	Bappeda-Litbang	Jumlah Laporan Keuangan & Fisik Kegiatan Bappeda-Litbang	18 Lap	3,500,000	950,000	100.00	27.14	
	<b>Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran OPD</b>				<b>12,500,000</b>	<b>12,312,000</b>		98.50	
21	Penyusunan RKA OPD	Bappeda-Litbang	Adanya Dokumn RKA Bappeda-Litbang	2 Dok	3,500,000	3,500,000	100.00	100.00	
22	Penyusunan DPA OPD	Bappeda-Litbang	Adanya Dokumn DPA Bappeda-Litbang	2 Dok	5,000,000	4,812,500	100.00	96.25	
23	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Bappeda-Litbang	Adanya Dokumn Rencana Kerja Bappeda-Litbang	1 Dok	4,000,000	3,999,500	100.00	99.99	
	<b>Program Pengembangan Data/informasi</b>				<b>947,310,310</b>	<b>935,788,716</b>		98.78	
24	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Praswil dan SDA		<b>Persentase ketersediaan Data dan Informasi pada Bidang-bidang Pembangunan Lingkup Praswil dan SDA</b>		<b>55,210,200</b>	<b>55,210,200</b>	<b>100.00</b>	100.00	
25	Penyusunan/Pengisian 8 Kelompok Data SIPD dan Profil Daerah	Bappeda-Litbang	Jumlah Dokumen SIPD	1 Dok	105,000,000	104,374,000	100.00	99.40	



No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran (Output)		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi (%)		Ket
			Tolak Ukur	Target			Fisik	Keuangan	
26	Penyusunan Daftar Alokasi Kegiatan/Proyek APBD I/APBD II/APBN	Bappeda-Litbang	Tersusunnya Daftar Alokasi untuk 12 Kecamatan	1 Dok	17,020,000	17,019,500	100.00	100.00	
27	Koordinasi Pengendalian Dana Alokasi Khusus	Bappeda-Litbang	Terkoordinasinya Perencanaan DAK, TP dan Dekonsentrasi serta laporan realisasi pelaksanaan DAK	12 Bulan	130,743,500	129,184,175	100.00	98.81	
28	Kajian Penelitian	Bappeda-Litbang	Jumlah objek kajian dan penelitian yang diterbitkan	2 Dok	226,550,000	223,720,150	100.00	98.75	
29	Up Dating E-Planning dan E-Monev	Bappeda-Litbang	Jumlah Updating aplikasi SIMPEPEDA (E-Planning dan E-Monev)	2 Aplikasi	98,000,000	97,009,000	100.00	98.99	
30	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan	Bappeda-Litbang	Jumlah Dokumen Rencana Induk Kelitbangan	1 Dok	58,549,500	53,601,150	100.00	91.55	
31	Koordinasi dan fasilitasi Pra Penyusunan RPJMD Tahun 2019-2023	Bappeda-Litbang	Jumlah Dokumen Informasi untuk penyusunan RPJMD	1 Dok	140,112,810	139,551,600	100.00	99.60	
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Kelitbangan	Bappeda-Litbang	Frekuensi pelaksanaan koordinasi	1 Tahun	116,124,300	116,118,941	100.00	100.00	
	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>				<b>98,853,700</b>	<b>90,318,400</b>		91.37	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran (Output)		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi (%)		Ket
			Tolak Ukur	Target			Fisik	Keuangan	
33	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Bappeda-Litbang	Frekuensi Rapat Koordinasi untuk perencanaan pemamfaatan dan pengendalian Tata ruang Daerah	10 Kali	50,453,700	49,353,200	100.00	97.82	
34	Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Bappeda-Litbang	Adanya Penetapan Kawasan-Kawasan Pedesaan	1 Dok	48,400,000	40,965,200	100.00	84.64	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>1,014,311,824</b>	<b>972,065,824</b>		95.84	
35	Penyusunan rancangan RKPD	Bappeda-Litbang	Adanya Dokumen RKPD Tahun 2018 sebagai pedoman menyusun Perencanaan Tahun 2019	1 Dok	161,266,400	157,270,400	100.00	97.52	
36	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Bappeda-Litbang	Adanya Laporan Daftar Prioritas Usulan Program Kegiatan Tahun 2019 hasil Musrenbang Kabupaten Tahun 2018	1 Lap.	215,912,000	215,912,000	100.00	100.00	
37	Evaluasi Pencapaian RPJMD	Bappeda-Litbang	Tersusunnya dokumen Evaluasi RPJMD	1 Dok	45,250,000	45,041,300	100.00	99.54	
38	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Bappeda-Litbang	Terbitnya dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018	1 Dok	80,225,000	79,725,000	100.00	99.38	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran (Output)		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi (%)		Ket
			Tolak Ukur	Target			Fisik	Keuangan	
39	Penyusunan KUA PPAS	Bappeda-Litbang	Tersusunnya dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2018 dan Pokok Tahun 2019	2 Dok	213,501,500	206,939,000	100.00	96.93	
40	Pelaksanaan Forum Perencanaan SKPD	Bappeda-Litbang	Terkoordinasinya program/kegiatan semua bidang dan adanya hasil evaluasi perencanaan semua bidang	43 OPD	47,335,424	47,335,424	100.00	100.00	
41	Verifikasi / Asistensi Rancangan Renja Perangkat Daerah	Bappeda-Litbang	Jumlah SKPD yang Renjanya di Verifikasi	43 OPD	19,800,000	19,750,000	100.00	99.75	
42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Bappeda-Litbang	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RKPD	1 Dok	35,000,000	34,873,800	100.00	99.64	
43	Koordinasi Rencana Aksi Daerah tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs	Bappeda-Litbang	Tersusunnya Matriks RAD TPB SDGs	1 Dok	196,021,500	165,218,900	100.00	84.29	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>				<b>160,450,000</b>	<b>146,915,174</b>		91.56	
44	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Bappeda-Litbang	Persentase hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi		91,500,000	84,014,074	100.00	91.82	
45	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok	Bappeda-Litbang	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi DBH Pajak Rokok	2 OPD	68,950,000	62,901,100	100.00	91.23	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran (Output)		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi (%)		Ket
			Tolak Ukur	Target			Fisik	Keuangan	
	<b>Program Perencanaan Sosbud dan Pemerintahan</b>				<b>687,513,150</b>	<b>497,969,128</b>		72.43	
46	Koordinasi Penyusunan RPJMDesa		<b>Adanya Dokumen RPJMDes</b>	<b>55 Desa</b>	49,437,500	46,699,000	100.00	94.46	
47	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah	Bappeda-Litbang	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah	95%	273,238,300	105,500,432	100.00	38.61	
48	Koordinasi dan Sinkronisasi antara RKPd dan RKPDes	Bappeda-Litbang	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tahunan Desa yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Kabupaten	112 desa	44,000,000	36,490,000	100.00	82.93	
49	Sinkronisasi dan Evaluasi Program Bidang Sosbud	Bappeda-Litbang	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi program Bidang sosbud	95%	76,588,850	75,926,296	100.00	99.13	
50	Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat (KKS)	Bappeda-Litbang	Tersedianya data pada OPD dan terbinanya Forum Kecamatan, Pokja Desa serta Lokus sasaran tatanan	9 Tatanan	93,649,600	88,004,700	100.00	93.97	
51	Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran responsif Gender	Bappeda-Litbang	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran responsif Gender		69,485,500	65,485,700	100.00	94.24	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran (Output)		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi (%)		Ket
			Tolak Ukur	Target			Fisik	Keuangan	
52	koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)	Bappeda-Litbang	Tersedianya Laporan tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Tahun	4,770,000	4,770,000	100.00	100.00	
53	Koordinasi Kabupaten layak Anak	Bappeda-Litbang	Terlaksananya Koordinasi Kabupaten layak Anak	100%	76,343,400	75,093,000	100.00	98.36	
	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>				<b>801,886,100</b>	<b>734,417,289</b>		91.59	
54	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Bappeda-Litbang	Jumlah kelembagaan P3A/GP3A yang dibina/ didampingi	45 P3A/GP3A	300,000,000	281,728,550	100.00	93.91	
55	Koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi perencanaan Bidang Praswil SDA dan LH	Enrekang, Provinsi dan Pusat	Persentase pemenuhan permintaan mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi tingkat provinsi & Nasional	90%	153,280,601	145,864,300	100.00	95.16	
56	Koordinasi perencanaan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum/ Air Bersih	Enrekang, Provinsi dan Pusat	Persentase ketersediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan SPAM	80%	103,805,499	100,371,799	100.00	96.69	
57	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)		Adanya Dokumen KLHS	1 Dok	244,800,000	206,452,640	100.00	84.34	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran (Output)		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi (%)		Ket
			Tolak Ukur	Target			Fisik	Keuangan	
	<b>Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman</b>				<b>174,050,000</b>	<b>168,250,800</b>		96.67	
58	Koordinasi Rencana Pembangunan Sanitasi Permukiman	Bappeda-Litbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sanitasi yang Terbit	1 Dok	29,225,000	28,400,000	100.00	97.18	
59	Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Bappeda-Litbang	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Penyediaan Air Minum Baerbasis Masyarakat	100%	144,825,000	139,850,800	100.00	96.57	
	<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Monitoring/Pengendalian</b>				<b>214,207,000</b>	<b>213,718,012</b>		99.77	
60	Monitoring Evaluasi Program/Kegiatan	Bappeda-Litbang	Tersusunnya laporan reaisasi fisik dan keuangan triwulan dari sumber dana APBD I, APBD II, dan APBN	4 Dok	214,207,000	213,718,012	100.00	99.77	
<b>JUMLAH</b>					<b>5,772,131,069</b>	<b>5,387,916,416</b>	<b>100.00</b>	<b>93.34</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA**

**TAHUN 2019**



# **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 3 Telp. 0420 – 21222, Enrekang

---

## **PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. BABA, SE. MM  
Jabatan : Kepala Bappeda-Litbang Kab. Enrekang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd  
Jabatan : Bupati Enrekang  
Selaku atasan langsung pihak pertama  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Enrekang, Maret 2019

Pihak Kedua,  
**BUPATI ENREKANG**

Pihak Pertama,  
**Kepala Bappeda-Litbang Kab. Enrekang**

**Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd**

**Dr. H. BABA, SE.MM**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19681231 199403 1 105**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**BAPPEDA-LITBANG**

<b>No</b>	<b>SASARAN STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya sarana prasarana kelembagaan	Persentase administrasi perkantoran	95%
2.	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90%
3.	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentase Kedisiplinan Aparatur	37 Orang
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana	Persentase Kapasitas sumber daya aparatur yang baik	85%
5.	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan	Persentase dokumen perencanaan yang telah mengacu pada peraturan	95%
6.	Meningkatnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran SKPD	Terwujudnya Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	2 Dok (RKA, DPA)
7.	Meningkatnya konsistensi perencanaan program dan kegiatan	Persentase pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada perencanaan	100%
8.	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen KLHS	0%
9.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai informasi pengendalian pembangunan daerah Kabupaten Enrekang	100%
10	Berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	78% (7 Kw dari 9 kw)
11	Meningkatnya kesesuaian usulan program / kegiatan bidang ekonomi pada proses Buttom UP-Top Down	Persentase capaian program perencanaan pembangunan ekonomi	* Kab=95% *Prov-=90% *Pusat=90%
12	Meningkatnya kesesuaian usulan program / kegiatan bidang sosbud pada proses Buttom UP-Top Down	Persentase realisasi jumlah dokumen dan buku perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Enrekang	* Kab=95% *Prov-=90% *Pusat=90%
13	Meningkatnya pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan Sanitasi perkotaan dan permukiman	Persentase Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	100%

<b>No</b>	<b>SASARAN STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
14	Meningkatnya pengembangan kawasan perkotaan dan permukiman	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengembangan kawasan perkotaan dan permukiman	0%
15.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	ada
16.	Meningkatnya Pengendalian/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%
17.	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase realisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat (PNPM-PISEW)	100%
18.	Meningkatnya Data dan Informasi Statistik Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Statistik Daerah	90%

<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
1.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp. 30.000.000	APBD
2.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp. 100.000.000	APBD
3.	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 873.000.000	APBD
4.	Program peningkatan disiplin Aparatur	Rp. 55.000.000	APBD
5.	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 200.000.000	APBD
6.	Program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 4.500.000	APBD
7.	Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Rp. 21.000.000	APBD
8.	Program Pengembangan data/Informasi	Rp. 856.000.000	APBD
9.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh	Rp. 177.000.000	APBD
10.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan perencanaan pembangunan Daerah	Rp. 220.000.000	APBD
11.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 847.900.000	APBD
12.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 391.500.000	APBD
13.	Program Perencanaan Sosial dan	Rp. 358.760.000	APBD

<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>		<b>REALISASI</b>
	Budaya			
14.	Program Perencanaan prasarana wilayah dan Sumber daya Alam	Rp.	1.100.400.000	APBD
15.	Program Percepatan pembangunan Sanitasi pemukiman	Rp.	50.000.000	APBD
16.	Program pengembangan system pelaporan monitoring/pengendalian & Evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah	Rp.	287.180.000	APBD
	<b>Total</b>	Rp.	<b>5.572.240.000</b>	

BUPATI ENREKANG,

KEPALA BAPPEDA-LITBANG

Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd

Dr. H. BABA,SE. MM

PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA,IV/C

NIP : 19681231 19940303 1 105

